

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sedangkan dalam pelaksanaannya di daerah peran dan fungsi tersebut ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang di pimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Kepala BPBD Propinsi dan Sekretaris Daerah di semua Kabupaten / Kota se Indonesia.⁵⁴

⁵⁴ Dhea Justitia, *Analisis Bencana Kabupaten Tanah Laut* , Wawancara Pribadi 13 Juni 2023

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN BPBD

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Penanggulangan Bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana yang meliputi :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta kontruksi secara adil dan merata;

- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati baik secara insidental maupun periodik sebulan sekali;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang untuk keperluan penanggulangan bencana;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;

- b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;
- f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan barang;
- i. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

1. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan operasional penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
 - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan / ketatausahaan.

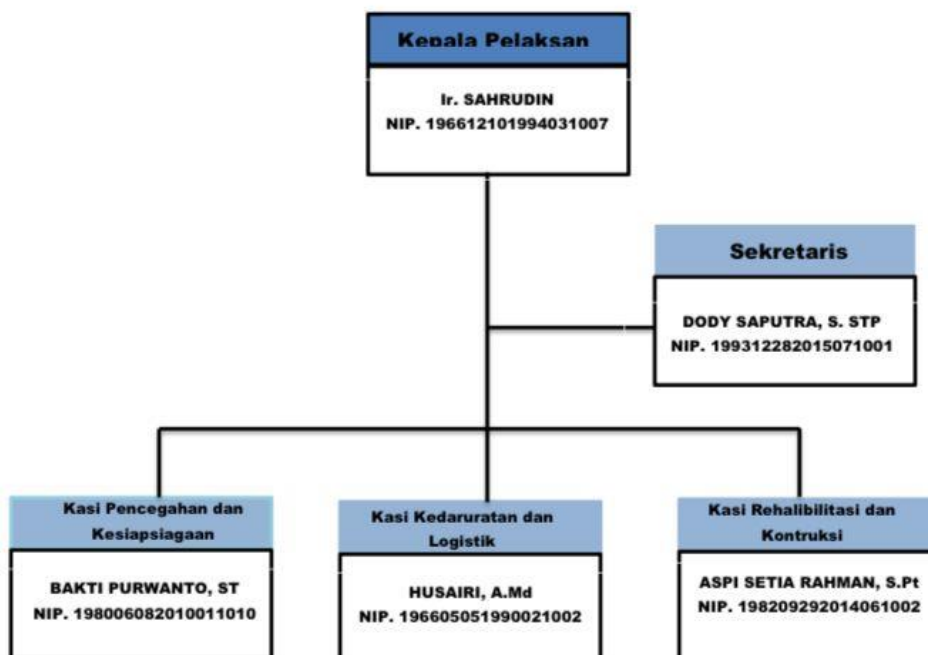
Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 5

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut
 - a. Penetapan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana;
 - b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- e. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Data base penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Penetapan pedoman penanggulangan bencana;
- h. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan Pendidikan untuk keperluan penanggulangan bencana;
- i. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat berkenaan penanggulangan bencana; dan
- j. Penetapan kebijakan daerah untuk penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA	JABATAN
1	Ir. SAHRUDIN	KEPALA PELAKSANA
2	DODY SAPUTRA, S.STP	SEKRETARIS
3	HUSAIRI, A. Md	KASI KEDARURATAN & LOGISTIK
4	ASPI SETIA RAHMAN, S.Pt	KASI REHABILITASI & REKONSTRUKSI
5	BAKTI PORWANTO,	KASI PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN
6	DHEA JUSTITIA SAPUTRI, S.Psi	ANALIS BENCANA
7	LARATNA HANDAYANI	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN & PROGRAM
8	USWATUN HASANAH	PENGADMINISTRASI UMUM
9	EDY SISWOYO, A. Md	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
10	ABDULLAH HAIDI	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN

11	TEGUH HERIYADI	BENDAHARA
12	WAHYUNI	PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN
13	BAKHRAM	PENGADMINISTRASIAN SARANA & PRASARANA
14	NADA SUNA MAULIDAMAYANTI AGUSTININGTYAS, A. Md	PRANATA BENCANA
15	SUAIBATUL AHMAD	PENGEMUDI MOBIL DAMKAR PADA KASI PK
16	AKHMAD ALFIANNOOR	PENGADMINISTRASI UMUM PADA KASI RR
17	MUHAMAD JAIN	PENGADMINISTRASI UMUM PADA KASI KL
18	M. YASIN THOHARI, S. Pd	RESCUER PELAKSANA LANJUTAN
19	SURIANSYAH, SE	RESCUER PELAKSANA LANJUTAN
20	M. INDRA LAKSANA	RESCUER PELAKSANA PEMULA
21	DINA HERLIANI, A. Md	PET PUSDALOPS PB
22	ESTY WULANDARI	PET PUSDALOPS PB
23	MUTMAINNA, S. Pd	PET PUSDALOPS PB
24	DEWI AMELIA SARI, SE	PENYUSUN RENCANA REHABILITASI
25	RIRIN RIYANI, SKM	PENGADMINISTRASI PERSURATAN
26	MURNIYATI, S. Pd	ANALIS RENCANA PROGRAM & KEGIATAN
27	MASROH	PENGADMINISTRASI PERSURATAN
28	MASDIYANTO, A. Md Kep	PRANATA BENCANA
29	DAHLIA	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
30	M. RIFKY ZANUAR	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN
31	DEDY NURMANSYAH	RESCUER PELAKSANA PEMULA
32	MUBASYIR	RESCUER PELAKSANA PEMULA
33	PARIMIN	RESCUER PELAKSANA PEMULA

34	HAIRUL ANWAR	RESCUER PELAKSANA PEMULA
35	BACHTIAR BAHRONI	RESCUER PELAKSANA PEMULA
36	CAHYADI RAHMAD ANGGARA	RESCUER PELAKSANA PEMULA
37	SAYYID MUHAMMAD	RESCUER PELAKSANA PEMULA
38	M. REVKY FADILLA	RESCUER PELAKSANA PEMULA
39	AHMAD NAWAWI	RESCUER PELAKSANA PEMULA
40	SUHATMAN	RESCUER PELAKSANA PEMULA
41	DIKY SUPRIYADI	RESCUER PELAKSANA PEMULA
42	ZAINI RIAN NOR, SKM	RESCUER PELAKSANA LANJUTAN
43	ADIT NURDIAWAN	RESCUER PELAKSANA PEMULA
44	AHMAD NURFAIJIN	RESCUER PELAKSANA PEMULA
45	YUSUF	RESCUER PELAKSANA PEMULA
46	WAWAN SETIADI	RESCUER PELAKSANA PEMULA
47	RONY ALFIN SAPUTRA	RESCUER PELAKSANA PEMULA
48	KOSIM	RESCUER PELAKSANA PEMULA
49	M. JAINI	RESCUER PELAKSANA PEMULA
50	JARKAWI	RESCUER PELAKSANA PEMULA
51	M. YUSUF	RESCUER PELAKSANA PEMULA
52	ASNAN BULGARI	RESCUER PELAKSANA PEMULA
53	AGIL HARISMAN, A. Md	RESCUER PELAKSANA
54	SLAMET TRIYANTO	RESCUER PELAKSANA PEMULA
55	ABDUL HALIM, A. Md Kep	RESCUER PELAKSANA

Sumber: Dhea Justitia, *Analisis Bencana Kabupaten Tanah Laut*, Wawancara Pribadi 13 Juni 2023.

Desa Pandahan memiliki luas wilayah 2350 h/m². Dengan luas permukiman 80 h/m², luas persawahan 100 h/m², luas perkebunan 5 h/m², kuburan 4 h/m², pekarangan 20 h/m², luas perkantoran 242,5 m², luas prasarana umum lainnya 1827,5 h/m², dengan total luas 2350 h/m², dengan menurut penggunaan memiliki luas wisata. Batas desa Pandahan adalah sebagai berikut: ⁵⁵

⁵⁵ Riska Nirmala Dewi, *Profil Desa Pandahan*, 2022. *Wawancara Pribadi*. 5 Juni 2023

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Landasan Ulin Utara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Liang Anggang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Handil Birayang Atas
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sambangan.

Sebagai salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, Desa Pandahan memiliki kesesuaian kriteria wilayah. Diantara kesesuaian kriteria wilayah Desa Pandahan sebagai pembentukan KB adalah sebagai berikut:

- a. Kumuh. Dimana sebagian masyarakat banyak yang kurang hidup sehat dan bersih.
- b. Daerah Aliran Sungai (DAS). Wilayah Desa Pandahan termasuk daerah rawa yang dilewati aliran sungai.
- c. Padat penduduk. Kepadatan penduduk Desa Pandahan dapat dilihat dari jarak dan rapatnya rumah masyarakat yang menumpuk.

Desa Pandahan merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS), maka desa tersebut terkena dampak bencana alam yaitu banjir. Di Desa Pandahan terdapat 9 RT. Dan yang terdampak akibat banjir diantaranya RT. 1A, RT. 1B, RT. 2, RT. 3, RT. 4, RT. 5, RT. 6, RT. 7 dan sebagian wilayah RT. 8.⁵⁶

⁵⁶Dhiya'ul Haq, *Pegawai Swasta*, Wawancara Pribadi, 23 Agustus 2023

2. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 3 orang informan yang didapat dari Anggota BPBD Kabupaten Tanah Laut, dan 6 orang informan dari Kepala Desa Pandahan, Aparat setempat, dan masyarakat setempat. Hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama informan **Aspi Setia Rahman**, usia 41 tahun, alamat Komplek Wengga Pebahanan Pelaihari, pekerjaan PNS. Peraturan Bupati Tanah Laut dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan 29 Mei 2019. Dari pihak BPBD sudah melakukan sosialisasi ke desa-desa yang rawan bencana, mendorong pemuda dan pemerintah desa untuk membentuk kelompok relawan desa yang tanggap membantu warga desa ketika terjadi bencana di desa dan dapat membantu warga di desa lain. Selain itu juga mendorong desa-desa yang sudah membentuk kelompok relawan untuk mengajak desa lain disekitarnya untuk membentuk kelompok relawan mereka. BPBD juga berkerja sama dengan pemerintah desa dalam memberikan pelatihan bencana. Sosialisasi tentunya sudah dilakukan, namun biasanya sosialisanya tidak berlanjut di desa-desa disebabkan kendala anggaran di BPBD, kalau sudah begitu biasanya BPBD menawarkan pada desa untuk mengundang BPBD melanjutkan kegiatan. Ada desa-desa yang sudah mengerti tentang pentingnya PRB biasanya mengundang BPBD, tetapi ada juga desa yang tidak mengundang lagi, ada yang takut untuk

menggunakan anggaran desa untuk kegiatan seperti itu, padahal diperaturan menteri tentang anggaran desa sudah diatur berapa besar anggaran desa untuk kebencanaan, salah satu contoh penggunaan anggaran desa dengan melakukan pelatihan/sosialisasi terkait bencana. Bisa juga disebabkan anggaran desa habis jadi tidak mendanai lanjutan kegiatan. Dengan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan di desa-desa rawan bencana diharapkan masyarakat setempat dapat mengembangkan pengetahuan kesadaran, dan keinginan untuk bergerak ketika terjadi bencana sehingga dapat mengurangi kerugian material maupun non material sebagai akibat bencana.

Sebenarnya bisa saja menggunakan forum-forum pertemuan seperti coffe morning bersama kepala instansi Daerah dan kepala Daerah, acara menunggal yang rutin digelar sebagai sarana untuk menyebarluaskan tentang pengetahuan pentingnya RPB. Penyebaran informasi secara digital yang juga penting dimasa 4.0 seperti sekarang. Kemudian forum RPB tentu saja sangat penting untuk mendukung pelaksanaan peraturan ini. Mungkin sudah ada beberapa masyarakat yang mengetahui atau pernah mengetahui tetapi secara umumnya belum banyak yang mengetahui peraturan seperti ini ada. Kerena pada umumnya masyarakat sipil tidak tahu mengenai peraturan apa yang dibuat pemerintah daerah, untuk apa dan mengapa peraturan itu diperlukan atau dibuat. Sampai sekarang BPBD masih berusaha menjalankan kegiatan sesuai tupoksinya termasuk dengan hal-hal yang

masuk dalam RPB seperti melakukan sosialisasi potensi bencana di desa-desa rawan bencana, persiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, membekali masyarakat dengan pengetahuan terkait apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika terjadi bencana dan setelah terjadi bencana, membimbing pemerintah desa, kelompok relawan dan instansi terkait mengenai bencana”

Dari uraian diatas memberikan gambaran bahwa bencana banjir dapat dicegah dengan cara sosialisasi, pelatihan dan juga membentuk kelompok-kelompok relawan di Desa yang memang langganan banjir setiap tahun. Banjir ini juga bukan hanya tanggung jawab BPBD saja melainkan dari pemerintah atau instansi-instansi terkait bencana alam.⁵⁷

Nama informan **Bakti Purwanto, ST.**, usia 43 tahun, Alamat Jl. Dahlia RT.16 RW. 05, Komp. Taman Asri, Kelurahan Halang, pekerjaan kasi pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tanah Laut. BPBD melakukan sosialisasi kepada Desa-Desa lewat Kecamatan dan diteruskan sosialisasi oleh Kecamatan ke desa-desa, selain melakukan sosialisasi secara langsung BPBD juga mensosialisaikan lewat media sosial. BPBD dan Pemerintah melakukan pembagian sembako ketika banjir terjadi, menyiapkan tempat evakuasi, melakukan pencatatan data kepada desa yang terdampak banjir untuk bantuan perbaikan. BPBD juga menunggu

⁵⁷ Aspi Setia Rahman, *Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi*, Wawancara Pribadi 22 Mei 2023

informasi dari BPBD Provinsi dan BMKG yang saling kordinasi mengenai bencana banjir. Untuk bantuan memang ada kesulitan karena menggunakan uang Negara dan harus memenuhi prosuder-prosuder yang dilalui, jadi pihak BPBD juga berharap untuk ke depan tentang pendanaan saling kordinasi mulai dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten agar mengantisipasi kesulitan saat bencana banjir terjadi.”

Dari hasil wawancara di atas bahwa pihak BPBD melakukan sosialisasi secara langsung dan juga sosialisai dimedia sosial, BPBD saling kordinasi dengan BPBD Provinsi dan juga BMKG.⁵⁸

Nama informan **Dhea Justitia, S., S.Psi**, usia 29 tahun, alamat Desa Angsau, pekerjaan ibu rumah tangga/analisis bencana Kabupaten Tanah Laut. Dalam menjalankan tugas sebagai Analisis Bencana ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan bencana ini seperti belum terbentuknya forum pengurangan risiko bencana karena belum didukung dengan peraturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh kepala Daerah, kurang optimalnya fungsi komando dan kendali pada masa krisis dan tanggap darurat dikarenakan belum didukung oleh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang terstruktur, informasi penataan ruang untuk mengurangi risiko bencana dalam pembangunan daerah masih belum banyak dimanfaatkan masyarakat, stuktur organisasi, personil dan fasilitas yang dimiliki BPBD masih belum memandai seperti tipenya

⁵⁸ Bakti Purwanto, *Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan*, Wawancara Pribadi 25 Mei 2023

yang masih B sedangkan pemerintah pusat ingin semua BPBD memiliki tipe A. faktor pendukung kesadaran akan pentingnya PRB koordinasi antara pihak, dukungan antara pihak terutama dari pemerintah daerah setempat, tapi ini sendiri masih kurang berjalan optimal sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan RPB. Secara jumlah dan keterampilan personel masih harus ditingkatkan dan diperlukan kesadaran akan pentingnya peranan masing-masing pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana.”

Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa masih belum ada terbentuknya forum pengurangan risiko bencana karena belum didukung dengan peraturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh kepala Daerah, kurang optimalnya fungsi komando dan kendali pada masa krisis dan tanggap darurat dikarenakan belum didukung oleh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang terstruktur,. Secara jumlah dan keterampilan personel masih harus ditingkatkan dan diperlukan kesadaran akan pentingnya peranan masing-masing pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana.⁵⁹

Nama informan **H. Alpin Taurus, S.Pd** usia 60 tahun, Desa Pandahan Rt.05 no 22, Kepala Desa Pandahan. “ Bencana banjir besar pada tahun 2021 siklusnya bisa 50 tahun sekali, Pada banjir besar terjadi bangunan rata-rata semua rumah terendam bisa sampai 1.5 meter, perbaikan yang dilakukan masyarakat pasca banjir ialah

⁵⁹ Dhea Justitia, *Analisis Bencana Kabupaten Tanah Laut* , Wawancara Pribadi 13 Juni 2023

renovasi rumah pasca banjir, dengan bantuan pemerintah dari kabupaten 10 rumah dari provinsi 10 rumah, diukur dengan tingkat kerusakan, untuk bantuan dari pemerintah daerah ada berupa sembako untuk warga yang mengungsi dikarenakan desa pandahan ini menampung dua desa lain yaitu Desa Birayang Atas dan Desa Kurau ada 3 posko yang disediakan di sekolah, di pasar dan di masjid yang dijadikan posko. Untuk fasilitas sekitar 60% mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bencana banjir besar. Waktu pemulihan pasca banjir menggunakan waktu 2 bulan sampai 1 tahun mengembalikan keadaan dan kegiatan seperti semula, banjir besar ini disebabkan banyaknya bangunan perumahan daerah Banjarbaru dan pembukaan lahan di wilayah kiram yang dulunya hutan lindung dan sekarang banyak proyek dan itu juga mempengaruhi air turun ke desa pandahan menyebabkan banjir.

Dari aparat desa sudah mensosialikan kemasyarakatan sekitar jika hujan lebat turun agar siap siaga dan berhati-hati, banjir besar tidak diduga terjadi pada tahun 2021 diluar dari perkiraan warga, karena warga mengira cuma banjir biasa tidak banjir besar. Tentang peraturan penanggulangan bencana banjir memang belum ada disosialisasikan dari pemerintah kabupaten ke Desa Pandahan sebelum terjadinya bencana banjir besar kemaren. Sudah ada pengusulan beberapa kali untuk pengerokkan sungai di desa pandahan tetapi belum berjalan sesuai dengan harapan kepala desa dan aparat desa. Dari

pemerintah pusat melakukan peninggian jalan dan dari pemerintah daerah pengorkan sungai sekitar 500 meter pasca banjir.”

Dari uraian Kepala Desa Pandahan diatas mengatakan bahwa dari pihak pemerintah tidak ada sosialisai tentang penanggulangan bencana banjir ke Desa Pandahan sebelum banjir besar terjadi, akan tetapi sudah ada pengusulan untuk pengerokan sungai di Desa Pandahan walaupun belum berjalan dengan harapan, dari pemerintah pusat juga memberikan bantuan rumah 10 buah dengan syarat tingkat kerusakan yang sesuai dengan kreteria pemerintah pusat, begitu juga dengan pemerintah Kabupaten warga juga mendapatkan bantuan 10 rumah yang diukur dengan tingkat kerusakan.⁶⁰

Nama informan **Dhiya’ul Haq**, usia 22 tahun, Desa Pandahan Rt. 01 A, pekerjaan pegawai swasta. “Penanggulangan bencana yang diterapkan para aparat desa yaitu sudah menyiapkan pengungsian dan menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika terjadi hujan yang terus-menerus dan penurunan air dari desa lain yang menyebabkan banjir terjadi. Aparat desa sudah menyiapkan 2 posko 1 di pasar dan di sekolah untuk warga yang akan mengungsi. Sedangkan masyarakat sudah terbiasa dengan banjir 15 cm sampai 40cm dan mereka tidak mengungsi ketempat yang sudah disediakan aparat desa karena banjir biasa terjadi di Desa Pandahan setiap tahun itulah yang membuat warga setempat sudah terbiasa dalam menyikapi

⁶⁰ H. Alpin Taurus, *Kepala Desa Pandahan*, Wawancara Pribadi 13 Juni 2023

bencana banjir biasa, tidak taunya bahwa banjir yang terjadi lebih dari perkiraan warga dari tahun-tahun yang lalu, dan juga banjir besar datang tiba-tiba dimalam hari sekitar pukul 02.00 subuh, dari kejadian bencana banjir besar tersebut membuat warga setempat banyak yang tidak sempat menyelamatkan barang-barang perlengkapan rumah ataupun elektronik warga di rumah mereka, banyak juga warga yang terjebak ddidalam rumah karena tidak mengungsi sebelum banjir besar terjadi. bencanaa banjir besar pada saat itu sampai 1,5 meter dan hampir semua rumah terendam air yang menyebabkan banyak kerusakan rumah warga, barang-barang elektronik dan perlengkapan rumah lainnya.”

Dari uraian salah satu aparat Desa Pandahan di atas mengatakan bahwa masyarakat memang tidak mengungsi pada saat banjir terjadi karena menurut masyarakat hanya banjir biasa, padahal aparat desa sudah menghimbau dan mensosialisakan ke masyarakat sekitar untuk berhati-hati apabila hujan secara terus menerus tetapi waga tetap kekeh berada dirumah meraka, karena banjir ini sudah langganan warga sarakan setiap tahun kecuali banjir besar yang terjadi kemaren itu hanya terjadi 50 tahun sekali.⁶¹

Nama informan **Arisandi Armada Kasih**, usia 27 tahun, Desa Pandahan Rt.01A pekerjaan kepala Dusun Pandahan, “Warga yang terdampak banjir mengalami kesulitan bantuan dari hari pertama

⁶¹ Dhiya'ul Haq, *Pegawai Swasta*, Wawancara Pribadi 13 Juni 2023

sampai hari ke tiga dikarenakan mungkin tidak ada persiapan oleh pemerintah karena banjir besar tidak diduga terjadi akan tetapi dari hari ke empat sampai pasca banjir banyak bantuan dari pemerintah. Pada waktu banjir ada dua macam untuk pengumpulan bantuan di pusatkan di kantor desa, yang dipantau langsung oleh aparat setempat untuk warga yang terdampak bencana, tetapi aparat desa juga tidak melarang jika ingin langsung membagikan bantuan ke warga yang sedang terdampak banjir besar tetapi hal tersebut membuat bantuan menumpuk pada posko-posko tertentu saja sedangkan banyak posko yang tidak dapat bantuan karena kurang pantauan. Kerugian besar bencana banjir adalah lahan pertanian rusak sekitar 80%, sedangkan warga pandahan memang pencaharian 70% masyarakatnya bertani, jadi banyak perubahan terjadi pasca banjir besar itu.

Dari hasil wawancara diatas warga menjelaskan bahwa pada saat hari pertama dan ketiga memang tidak ada bantuan dari pemerintah maupun dari relawan-relawan lain. Kerugian juga mencapai 80% pada lahan pertanian warga itu yang membuat warga sulit untuk beradaptasi dengan keadaan pasca banjir.⁶²

Nama informan **Surya**, usia 19 tahun, Desa Pandahan RT.01 B, pekerjaan montir, “Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana banjir besar tidak terjadi dari aparat desa sudah melakukan sosialisai ke masyarakat agar berhati-hati apabila

⁶² Arisandi Armada Kasih, *Kepala Dusun Desa Pandahan*, Wawancara Pribadi 13 Juni 2023

musim hujan terus-menerus terjadi maka dihimbau untuk mengungsi secepatnya jika air sudah mulai naik lebih dari 50cm pada rumah warga. Dan dari aparat juga menyediakan pengungsian terlebih dahulu agar mengantisipasi terjadinya terjebak pada saat terjadi banjir selain itu sudah ada mengusulkan pengerokkan aliran sungai-sungai kecil. Dan sudah ada penggarapan aliran sungai dari hilir yang bertahap. Sebab aliran sungai ini adalah pengaruh yang sangat besar terjadinya banjir.”⁶³

Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa aparat desa sudah melakukan sosialisasi dan memberikan himbangan pada warga agar berhati-hati, aparat desa juga sigap dalam menyikapi terjadinya banjir dengan menyediakan pengungsian terlebih dahulu sebelum banjir besar terjadi hanya saja warga tidak mengungsi, sebelum banjir besar dan pasca banjir terjadi aparat sudah mengusulkan aliran-aliran sungai kecil agar bisa mengurangi meluapnya air pada Desa Pandahan.

Informan **Muhammad Khairil Wahyu**, usia 22 tahun, Desa Pandahan Rt.8 Rw.02, pekerjaan Guru Honorer. “Pada saat banjir terjadi ada beberapa warga yang belum sempat mengungsi karena banjir besar terjadi pada tengah malam secara tiba-tiba, untuk pengungsian sudah disediakan pihak aparat desa ada 3 posko terdiri dari sekolah, pasar dan masjid pada saat itu. Untuk bantuan bisa dikatakan cukup dan bisa dikatakan tidak juga yang pasti dicukup-

⁶³ Surya, *Masyarakat Desa Pandahan*, Wawancara Pribadi 14 Juni 2023

cukupkan saja. Sempat tidak ada bantuan diawal banjir terjadi itu yang membuat warga kesulitan tetapi pada hari ke 4 sudah ada bantuan dari pemerintah dan juga relawan lain yang membantu tersalurkanannya bantuan dan sumbangan dari masyarakat lain. Kerugian warga pasca banjir terjadi rusak barang-barang elektronik perlengkapan rumah seperti kursi, kasur, lemari karena terendam air, dan perabotan rumah tangga yang terbawa arus banjir, lahan pertanian juga rusak 70% yang membuat warga pandahan kesulitan untuk kembali beraktivitas seperti biasa, karena warga masih menyesuaikan keadaan seperti merenovasi rumah, membersihkan barang-barang yang masih bisa dipakai dan sebagainya.”

Dari uraian hasil wawancara diatas warga mengatakan bahwa banyak kerugian yang warga alami pasca banjir terjadi mulai dari bangunan rumah, perlengkapan rumah dan alat elektronik yang terendam banjir kurang lebih 2 minggu, lahan pertanian juga mengalami kerusakan sekitar 80%. Dari hal tersebut membuat warga lebih lama untuk beradaptasi dengan keadaan.⁶⁴

Nama Informan **Muhammad Wardi**, usia 22 tahun, Jl.A.Yani Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati, Karyawan Swasta. “Dari segi bangunan banyak yang rusak di akibatkan terendam air, dinding rumah banyak jabuk karna banyak bangunnan rumah warga yang terbuat dari kayu, untuk bantuan dari pemerintah dan aparat desa ada

⁶⁴ Muhammad Khairil Wahyu, *Guru Honorer*, Wawancara Pribadi 13 Juni 2023

sembako yang disalurkan melalui aparat dibandu para relawan desa-desa lain untuk menyalurkannya. Dalam perbaikan bangunan dan serabutan diperbaiki sendiri sesuai dengan tingkat kerusakan, yang direnovasi oleh warga berupa tiang rumah yang jabuk karena terendam banjir, untuk masa pemulihan bangunan memerlukan waktu 1 bulan tergantung kerusakan bangunan warga juga membersihkan kotoran pasca banjir bisa memakan waktu 3-4 harian, banjir biasa memang sering terjadi di desa pandahan pada musim hujan bisa sampai naik teras rumah warga.

Sebab terjadinya banjir besar ialah dari buang sampah sembarangan yang mempengaruhi air tersumbat, musim penghujan dan debit air yang meluap di dermaga riam kanan adanya pembukaan tambak arus sungai yang turun ke desa pandahan menyebabkan banjir besar terjadi pada tahun 2021. Untuk tanda-tanda banjir bisa diterka-terka pada dua tahun yang lalu, kalau sekarang sudah tidak bisa diterka-terka lagi karna cuaca sekarang tidak menentu. dari pemerintah mengelola pembagian sembako pada saat banjir terjadi yang bisa dibilang cukup dan dicukupkan untuk memenuhi kebutuhan pada saat banjir. Banyak bantuan sembako dan makanan lainnya dari perusahaan dan relawan desa lain yang ikut menyalurkan bantuan, dari aparat dan pemerintah juga membangun pembentukan posko yang dibantu oleh warga setempat untuk mempermudah jika ada situasi darurat terjadi pada saat banjir. Penerapan penanggulangan bencana di

desa pandahan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, karna warga masih banyak tidak tahu tentang peraturan tersebut contohnya saja masih banyak yang buang sampah sembarangan bisa mengakibatkan saluran air tersumbat, arus air banyak yang rusak, kadar air meningkat, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara mengantisipasi bencana banjir. Dan untuk pasca banjir aktivitas kembali normal seperti biasa warga juga cepat beradaptasi dengan kondisi yang ada karna bagaimanapun juga harus dihadapi dan dijalani dengan keadaan yang ada. Saya sendiripun mengungsi ke tempat keluarga saya yang tidak terdampak banjir begitu juga dengan warga setempat ada yang mengungsi ke tempat keluarga dan ada yang mengungsi ke posko yang sudah disediakan pemerintah dan aparat desa. Kerugian yang alami warga setempat dari segi bangunan banyak jabuk karena kebanyakan rumah warga dari kayu, perabutan rumah banyak yang terbawa arus, perlengkapan rumah banyak yang rusak akibat terendam banjir.⁶⁵

Dari uraian hasil wawancara di atas warga mengatakan bahwa memang kurangnya sosialisasi dari pemerintah ke warga setempat bukan hanya sosialisasi saja bantuan pada saat banjir terjadipun banyak warga yang masih kesulitan dalam bantuan sembako yang hanya bisa dibilang dicukup-cukupkan saja. Sedangkan korban banjir ini tidak hanya orang tua, dewasa maupun anak-anak, maka dari itu

⁶⁵ Muhammad Wardi, *Masyarakat Desa Pandahan*, Wawancara Pribadi 15 Juni 2023

bantuan pada saat banjir terjadi sangat diperlukan, untuk warga setempat juga belum menyadari diri mereka untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan dari hal kecil tersebut bisa mengakibatkan banjir besar terjadi lagi, maka dari itu yang saya harapkan kedepannya untuk pemerintah dan aparat desa agar sering-sering mengadakan sosialisasi dengan warga setempat baik melalui media sosial maupun sosialisasi secara langsung.

Table 1

Matrik

Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019

Tentang Rencana Penanggulangan Bencana

(Studi Kasus Bencana Banjir Di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati

Kabupaten Tanah Laut)

No	Nama Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1.	Aspi Setia Rahman	Melakukan sosialisasi ke desa-desa yang rawan bencana, mendorong pemuda dan pemerintah desa untuk membentuk kelompok relawan desa yang tanggap membantu warga desa ketika terjadi	Ada desa yang tidak mengundang lagi, ada yang takut untuk menggunakan anggaran desa untuk kegiatan seperti itu, padahal diperaturan menteri tentang anggaran desa

		bencana di desa dan dapat membantu warga di desa lain.	sudah diatur berapa besar anggaran desa untuk kebencanaan, salah satu contoh penggunaan anggaran desa dengan melakukan pelatihan/sosialisasi terkait bencana.
2.	Bakti Purwanto, ST.	BPBD juga mensosialisasikan lewat media sosial. BPBD dan Pemerintah melakukan pembagian sembako ketika banjir terjadi, menyiapkan tempat evakuasi, melakukan pencatatan data kepada desa yang terdampak banjir untuk bantuan perbaikan.	Untuk bantuan memang ada kesulitan karena menggunakan uang Negara dan harus memenuhi prosuder-prosuder yang dilalui
3.	Dhea Justia, S., S.Psi	Analisis Bencana ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam	Faktor pendukung kesadaran akan pentingnya PRB

		<p>penanggulangan bencana ini seperti belum terbentuknya forum pengurangan risiko bencana karena belum didukung dengan peraturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh kepala Daerah,</p>	<p>koordinasi antara pihak, dukungan antara pihak terutama dari pemerintah daerah setempat, tapi ini sendiri masih kurang berjalan optimal sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan PRB</p>
4	H. Alpin Taurus, S.Pd	<p>Tentang peraturan penanggulangan bencana banjir memang belum ada disosialisasikan dari pemerintah kabupaten ke Desa Pandahan sebelum terjadinya bencana banjir besar kemaren.</p>	<p>Pengusulan beberapa kali untuk pengerokkan sungai di desa pandahan tetapi belum berjalan sesuai dengan harapan kepala desa dan aparat desa.</p>
5.	Dhiya'ul Haq	<p>Penanggulangan bencana yang diterapkan para aparat desa yaitu sudah menyiapkan</p>	<p>Masyarakat memang tidak mengungsi pada saat banjir terjadi karena menurut masyarakat</p>

		<p>pengungsian dan menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati jika terjadi hujan yang terus-menerus dan penurunan air dari desa lain yang menyebabkan banjir terjadi.</p>	<p>hanya banjir biasa, padahal aparat desa sudah menghimbau dan mensosialisakan ke masyarakat sekitar</p>
6.	<p>Arisandi Armada Kasih</p>	<p>Warga yang terdampak banjir mengalami kesulitan bantuan dari hari pertama sampai hari ke tiga dikarenakan mungkin tidak ada persiapan oleh pemerintah karena banjir besar tidak diduga terjadi. Pada waktu banjir ada dua macam untuk pengumpulan bantuan di pusatkan di kantor desa, yang</p>	<p>Hari pertama dan ketiga memang tidak ada bantuan dari pemerintah maupun dari relawan-relawan lain</p>

		dipantau langsung oleh aparat setempat	
7.	Surya	Aparat desa sudah melakukan sosialisai ke masyarakat agar berhati-hati apabila musim hujan terus-menerus terjadi maka dihimbau untuk mengungsi secepatnya jika air sudah mulai naik lebih dari 50cm pada rumah warga.	Sebelum banjir besar dan pasca banjir terjadi aparat sudah mengusulkan aliran-aliran sungai kecil agar bisa mengurangi meluapnya air pada Desa Pandahan.
8.	Muhammad Khairil Wahyu	Beberapa warga yang belum sempat mengungsi karena banjir besar terjadi pada tengah malam secara tiba-tiba, untuk pengungsian sudah disediakan pihak aparat desa ada 3 posko terdiri dari sekolah, pasar dan masjid pada	Bantuan bisa dikatakan cukup dan bisa dikatakan tidak juga yang pasti dicukup-cukupkan saja. Sempat tidak ada bantuan diawal banjir

		saat itu.	
9.	Muhammad Wardi	<p>Bangunan banyak yang rusak di akibatkan terendam air, dinding rumah banyak jabuk karna banyak bangunnan rumah warga yang terbuat dari kayu, untuk bantuan dari pemerintah dan aparat desa ada sembako yang disalurkan melalui aparat dibandu para relawan desa-desa lain untuk menyalurkannya.</p>	<p>Implementasi penanggulangan bencana di desa pandahan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, karna warga masih banyak tidak tahu tentang peraturan tersebut contohnya saja masih bannyak yang buang sampah sembarang bisa mengakibatkan saluran air tersumbat, arus air banyak yang rusak, kadar air meningkat, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara mengantisipasi bencana banjir.</p>

3. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Tabel

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan tabel, mengenai bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut sehingga mempermudah memahaminya dan mengetahui sebagai berikut :

**REKAPITULASI KEJADIAN BANJIR
BPBD KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2021 S/D 2022**

Column Labels												
Kecamatan	2021				2022				Total Per Kali Kejadian 2021 & 2022	Total buah rumah terendam 2021 & 2022	Total KK 2021 & 2022	Total Jiwa 2021 & 2022
	Per Kali Kejadian	Terdampak			Per Kali Kejadian	Terdampak						
		Terendam (buah rumah)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Terendam (buah rumah)	Jumlah KK	Jumlah Jiwa				
Bajuin	1	82	129	384	1	131	153	436	2	213	282	820
Bati-Bati	11	2.671	2933	9708	1	71	71	0	12	2.742	3004	9708
Batu Ampar	3	243	363	745	2	68	68	209	5	311	431	954
Bumi Makmur	11	3.294	3789	11859		-	-	-	11	3.294	3789	11859
Jorong	6	804	896	2606	3	917	944	3596	9	1.721	1840	6202
Kintap	11	1.295	1444	4828	4	620	1138	2406	15	1.915	2582	7234
Kurau	14	3.451	3479	10921		-	-	-	14	3.451	3479	10921
Panyipatan	6	478	497	1777	4	278	353	1188	10	756	850	2965
Pelaihari	8	1.005	1005	3542	7	507	508	801	15	1.512	1513	4343
Takisung	17	2.797	3118	8783	6	651	670	2158	23	3.448	3788	10941
Tambang Ulang	3	220	246	795		-	-	-	3	220	246	795
Grand Total	91	16.340	17899	55948	28	3.243	3905	10794	119	19.583	21804	66742

Sumber : PUSDALOPS BPBD Tanah Laut

Gambar 1. 2 Rekapitulasi Kejadian Banjir Tanah Laut Tahun 2021 S/D 2022

Mengetahui,
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

B. Analisis

1. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana

Penerapan Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut No. 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana sudah dilaksanakan oleh pihak BPBD sesuai dengan hasil wawancara diatas. BPBD melakukan beberapa kegiatan mulai dari sosialisasi dengan Kecamatan lalu Kecamatan mensosialisasikan ke desa-desa untuk penanggulangan bencana dan mengajak masyarakat berkerja sama dengan BPBD, ada beberapa desa yang sudah membentuk kelompok relawan desa yang tanggap untuk membantu warga desa lain. BPBD juga melakukan sosialisai melalui media sosial agar masyarakat mudah mengetahui tentang penanggulangan bencana banjir.

Untuk bantuan memang ada kesulitan karena menggunakan uang Negara dan harus memenuhi prosuder-prosuder yang dilalui, jadi pihak BPBD juga berharap untuk kedepannya tentang pendanaan saling kordinasi mulai dari Desa, Kecamatan, dan Kabupaten agar mengatisipasi kesulitan saat bencana banjir terjadi. Sampai sekarang BPBD masih berusaha menjalankan kegiatan sesuai tupoksinya termasuk dengan hal-hal yang masuk dalam RPB seperti melakukan sosialisasi potensi bencana di desa-desa rawan bencana, persiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, membekali masyarakat dengan pengetahuan terkait apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika terjadi bencana dan

setelah terjadi bencana, membimbing pemerintah desa, kelompok relawan dan instansi terkait mengenai bencana. Menurut Nurdin Usman, implementasi mengarah kepada kegiatan, tindakan atau mekanisme dari suatu sistem, implementasi tidak hanya kegiatan biasa, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan terarah agar tercapainya tujuan kegiatan.⁶⁶ Berdasarkan hasil yang peneliti lakukan dengan bentuk observasi dan wawancara ke lapangan, kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di desa Pandahan Kabupaten Tanah Laut masih kurang baik, dilihat dari Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Bencana Banjir Di Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut) Peraturan Bupati Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang kurang baik, ini terlihat dari bagaimana pemerintah kurang melakukan sosialisasi.

2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penanggulangan bencana banjir

Adapun pengurangan risiko bencana karena belum didukung dengan peraturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh kepala Daerah, kurang optimalnya fungsi komando dan kendali pada masa krisis dan tanggap darurat di karenakan belum didukung oleh Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang terstruktur, informasi faktor

⁶⁶ Widodo Budiharto, Sigit Suryanto, *Teori dan Implementasi*, hlm. 6

penghambat dalam penanggulangan bencana ini belum terbentuknya forum penataan ruang untuk mengurangi resiko bencana dalam pembangunan daerah masih belum banyak dimanfaatkan masyarakat.

Dengan banyaknya organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu faktor pendukung implementasi tugas dan fungsi BPBD Tanah Laut. Organisasi inilah yang nantinya menjadi sumber daya manusia yang berkompten dibidang penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat teratasi dan tertangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan dari berdirinya badan ini.

Penulis menyimpulkan informasi dari pernyataan informan diatas bahwa dalam rangka menghadapi bencana alam yaitu perlu dilakukan pendidikan dini tentang tanggap darurat, serta pelatihan-pelatihan sehingga senantiasa memberikan manfaat dan tentunya kesiapsiagaan bagian setiap masyarakat ketika menghadapi bencana. Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Desa Pandahan Kabupaten Tanah Laut dapat dikatakan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan untuk itu harus ditingkatkan lagi agar hubungan yang terjalin menjadi contoh bagi yang lain. Faktor pendukung organisasi yang turut andil dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu faktor pendukung implementasi tugas dan fungsi BPBD Tanah Laut. Organisasi inilah yang

nantinya menjadi sumber daya manusia yang berkompeten dibidang penanggulangan bencana sehingga penanggulangan bencana dapat teratasi dan tertangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan apa yang diharapkan dari berdirinya badan ini. Pemerintah juga sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Perlindungan terhadap masyarakat dalam pemulihan bencana sangat dibutuhkan, makanya peran pemerintah sangat dibutuhkan, mengingat pengetahuan masyarakat tentang menjaga kondisi alam agar tetap terjaga keasliannya sangat minim.